



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/0013276 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 180/0003694 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003694 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0005546 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003694 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya ajuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, terkait Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten, serta Lisensi Arsitek, perlu adanya perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003694 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003694 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0005546 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003694 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/0005546 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0003694 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


PRASETYO ARIBOWO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 180/0013276 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 180/0003694 TAHUN 2021
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Rancangan Peraturan Gubernur ajuan dari SKPD | | | |
| 1. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Tindaklanjut terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 |
| 2. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Pelaksanaan/Amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 3. | Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Koridor Jaringan SUTET di Provinsi Jawa Tengah | | Dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan dan pemenuhan tertib tata ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Sinergi Pengembangan Kompetensi Provinsi Jawa Tengah (<i>Jateng Corporate University</i>) | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | <p>a. Mandatori Regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. Mewujudkan <i>Jateng Pinter Bareng</i> dengan mensinergikan pengembangan kompetensi yang terintegrasi sampai dengan kabupaten/kota dalam rangka reformasi birokrasi</p> |
| 5. | Tata Cara Kerjasama Daerah | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | <p>a. Kerjasama antar Pemerintahan Dalam Negeri;</p> <p>b. Kerjasama Pemerintahan dengan Pemerintah Luar Negeri/Dalam Negeri;</p> <p>c. Kerjasama antar Pemerintahan Daerah dengan Pihak Ketiga;</p> <p>d. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Luar Negeri.</p> |
| 6. | Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Pelaksanaan / amanat dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Nomor 4 Tahun 2021) |
| 7. | Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah | Biro Perekonomian | Pengaturan untuk semua BUMD Provinsi Jawa Tengah terkait pedoman pengelolaan perusahaan |
| 8. | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang PT PRPP (Perseroda) | | Menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang PT.PRPP (Perseroda) |
| 9. | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang PT Air Bersih Tirta Utama (Perseroda) | | Menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang PT.Air Bersih Tirta Utama (Perseroda) |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Kecamatan Jawa Tengah | | Menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang PT.BPR BKK Jateng (Perseroda) |
| 11. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Kecamatan | | Penyesuaian terhadap regulasi baru dari OJK serta penguatan kelembagaan PT.BPR BKK se Jawa Tengah |
| 12. | Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 | | Alokasi anggaran dilaksanakan setiap tahun |
| 13. | Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten | | Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah |
| 14. | Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah | | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor (P4GN) |
| 16. | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi di Rumah Sakit | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan yang telah disahkan pada tanggal 14 Desember 2020 |
| 17. | Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah Penampungan Sementara bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi | | |
| 18. | Layanan Terpadu | | |
| 19. | Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | | |
| 20. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak | | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 berdampak pada perlunya mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 (amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013) |
| 21. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | a. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada program unggulan keempat satgas kemiskinan, bantuan desa dan rumah tidak layak huni; b. Isi dari Peraturan Gubernur sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu adanya perubahan |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah | | <p>a. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada misi ketiga memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;</p> <p>b. Isi dari Peraturan Gubernur sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu adanya perubahan</p> |
| 23. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2039 | | Pelaksanaan/amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 |
| 24. | Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | | Tindak lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
| 25. | Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Perlu dilakukan pengkajian sehubungan dengan adanya revisi/ penyempurnaan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.41/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | <p>a. Perlu dilakukan pengkajian mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi di Bidang Pertambangan sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>b. Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang ini mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru.</p> |
| 27. | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | <p>a. Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja untuk mendukung investasi di Jawa Tengah melalui sistem terintegrasi antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Pencari Kerja, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, dan Stakeholder terkait;</p> <p>b. Dalam rangka pelayanan perizinan, rekomendasi, fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat/stakeholder, perlu adanya dasar hulu dan panduan yang seragam di Jawa Tengah;</p> <p>c. Dalam rangka peningkatan kemampuan/skill calon pekerja melalui pelatihan/vokasi/kompetensi.</p> |
| 28. | Kewajiban Tenaga Kerja Asing Kuasai Bahasa Indonesia | | Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 45 sebagai upaya untuk mempermudah transfer knowledge kepada Tenaga Kerja Indonesia |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29. | Penyelenggaraan Penerapan K3 di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah | | Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Jawa Tengah sebagai tindaklanjut kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 |
| 30. | Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Biro Organisasi | Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah |
| 31. | Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | | Tindak lanjut rencana revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah |
| 32. | Mal Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah | | Tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik |
| 33. | Penyelenggaraan Pelayanan Publik | | Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik. |
| 34. | Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | | Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah |
| 35. | Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah | | Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETEPERANGAN |
|-----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | | Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi Dinas Kesehatan yang bersifat khusus |
| 37. | Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A | | |
| 38. | Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B | | |
| 39. | Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas B | | |
| 40. | Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C | | |
| 41. | Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A | | |
| 42. | Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondhoutomo Provinsi Jawa Tengah Kelas A | | |
| 43. | Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kelas A | | |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 44. | Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | | Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja |
| 45. | Pelestarian dan Pengendalian Kawasan Danau Rawa Pening | Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Sebagai acuan mewujudkan perlindungan dan optimalisasi fungsi Kasawan Danau Rawa Pening. |
| 46. | Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah | RSJD Soedjarwadi Dr.RM. | <p>a. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan ditinjau kembali;</p> <p>b. Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan mendasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 216/MENKES/SK/VI/2013 tentang Penetapan Kelas RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sebagai rumah sakit khusus kelas A, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah sesuai tipe RS kelas A.</p> |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47. | Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Dinas Kelautan & Perikanan | Perlu dilakukan pengkajian ulang sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut |
| 48. | Perijinan Usaha Perikanan Tangkap di Jawa Tengah | | <p>a. Perlu dilakukan sinkronisasi substansi perizinan usaha perikanan, karena telah terbit dan diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2020;</p> <p>b. Perlu sinkronisasi mekanisme perizinan agar sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha terintegrasi secara elektronik (OSS)</p> |
| 49. | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah | Biro Hukum | Tindaklanjuti Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum |
| 50. | Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Satuan Polisi Pamong Praja | Pelaksanaan/amanaat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat |
| 51. | Tunjangan Risiko Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah | | |
| 52. | Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Provinsi Jawa Tengah. |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 53. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah | | Perlu dilakukan pengkajian sehubungan : a. Perluasan Pusat Layanan Autis menjadi Pusat Layanan Disabilitas (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020) tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas); b. Perluasan TIKP Dikbud menjadi Pusat Pengembangan Media Pembelajaran dan Peningkatan Kompetensi Guru. |
| 54. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah | | Perlu dilakukan pengkajian sehubungan Hasil evaluasi dari Kemendikbud terkait mekanisme pelaksanaan Penerimaan Siswa Didik Baru di Tahun 2021 |
| 55. | Penerimaan Peserta Didik Baru | | Tidak lanjut ditetapkan Peraturan Menteri Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK |
| 56. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | a. Ada perubahan nomenklatur dari Balai Pelaksana Teknis Jalan (BPTJ) menjadi Balai Pengelola Jalan (BPJ); b. Anjab ABKnya agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; c. Perubahan nomenklatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah. |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57. | Kebijakan dan Strategi Penyenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi | | <p>a. Sesuai amanah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya;</p> <p>b. Saat Direktorat Air Minum Ditjen CK sedang menyusun Jakstranas SPAM sehingga untuk sinkronisasi data Jakstraprov perlu menunggu Jakstranas;</p> <p>c. Pernah ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jakstrada Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 sehingga perlu pembaruan Peraturan Gubernur.</p> |
| 58. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penatausahaan | | <p>a. Mengatur hubungan dengan Penyedia Jasa kegiatan hanya dalam keadaan normal namun bila mana terjadi pemutusan hubungan kontrak, belum diatur pihak yang mengerjakan masa pemeliharaan;</p> <p>b. Di dalam kontrak hanya menyebutkan PPK dan tidak disebutkan PPTK, dalam kenyataannya yang tanda tangan di kwitansi pembayaran justru PPTK bukan PPKnya. Namun hal ini justru diatur dalam Pergub Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 88 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 Lampiran XIX Sistem dan Prosedur Belanja Langsung Barang dan Jasa Huruf C.2. (i);</p> <p>c. Staf teknis bertanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di lapangan, namun sejak tahun 2020 tanggung jawab itu diserahkan/dilaksanakan oleh konsultan.</p> |
| 59. | Lisensi Arsitek | | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek. |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah | RSUD Tugurejo | Perubahan isi disesuaikan dengan kesepakatan RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah |
| 61. | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah | | |
| 62. | Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| 63. | Satu Data Jawa Tengah | | Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia |
| 64. | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | | Sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah |
| 65. | Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | Pengkajian kembali |

| NO. | JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|-----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 66. | Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah | | |
| 67. | Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Inspektorat | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| 68. | Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | | Tindak lanjut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi |

B. Tindak Lanjut Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pelaksanaannya

| Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 32 (tiga puluh dua) Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pelaksanaannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) bidang | | |
|--|--|--|
| 1 | Penanaman Modal Dan Perizinan | |
| 2 | Tata Ruang | |
| 3 | Koperasi dan UMKM | |
| 4 | Pajak dan Retribusi Daerah | |
| 5 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 6 | Ketenagakerjaan | |
| 7 | Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| 8 | Perumahan dan Peremukiman serta pertanahan | |
| 9 | Jasa Konstruksi | |

Judul menyesuaikan dengan ajuan dari Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

| | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 10 | Desa | |
| 11 | Pertanian | |
| 12 | Industri dan Perdagangan | |
| 13 | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | |
| 14 | Rumah sakit | |
| 15 | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. | |

Rancangan Peraturan Gubernur Kumulatif Terbuka

| | |
|----|--|
| 1. | Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan perubahannya |
| 2. | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan perubahannya |
| 3. | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan perubahannya |
| 4. | Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan perubahannya |
| 5. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan perubahannya |
| 6. | Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan perubahannya |
| 7. | Pemberian Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan perubahannya |
| 8. | Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah |

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

